

# Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 (studi di SMAN 4 Tanjungpinang)

*by Nadia Nadia*

---

**Submission date:** 04-Jul-2024 09:33AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2412305559

**File name:** Jembatan\_Hukum\_Vol.\_1\_No.\_3\_September\_2024\_Hal\_181-194.pdf (304.1K)

**Word count:** 4577

**Character count:** 30330



## Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 (studi di SMAN 4 Tanjungpinang)

**Nadia Nadia**

Universitas Maritim Raja Ali Haji

**Fitri Kurnianingsih**

Universitas Maritim Raja Ali Haji

**Ramadhani Setiawan**

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: [2005020006@student.umrah.ac.id](mailto:2005020006@student.umrah.ac.id), [fitrikurnianingsih@umrah.ac.id](mailto:fitrikurnianingsih@umrah.ac.id), [ramadhanisetiawan@gmail.com](mailto:ramadhanisetiawan@gmail.com)

**Abstract.** *This research aims to find out how the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) in Tanjungpinang city in 2023 stueis at SMAN 4 Tanjungpinang, using descriptive method of qualitative approach, data collection is done by observation, interviews, documentation, and recording secondary data related to research problems, then qualitative alaysis is carried out. The results showed that implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) in Tanjungpinang city in 2023 study at SMAN 4 Tanjungpinang has been well implemented although there are several variabels that must be improved in the implementation of PIP in the future. Such as the lack of dissemination on information about PIP, there is no additional quita given, and the lack of use of funds obtained by recipitiens so that yhis can result in misuseof funds. Therefore, it is hoped that in the future the government can overcome the shortcomings in the implementation of PIP so that the implementationcan be more effective and efficient.*

**Keywords:** *Implementation, Smart Indonesia Program, Senior High School*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di kota Tanjungpinang tahun 2023 studi di SMAN 4 Tanjungpinang, dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, serta pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian dilakukan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Indonesia Pintar di kota Tanjungpinang studi pada SMAN 4 Tanjungpinang telah terimplementasikan dengan baik meskipun terdapat beberapa variabel yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan PIP kedepannya. Seperti kurangnya penyebaran informasi mengenai PIP, tidak ada penambahan kuota yang diberikan, serta kurangnya pengawasan penggunaan dana yang didapatkan penerima sehingga hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan dana. Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah dapat mengatasi kekurangan dalam Implementasi PIP agar pelaksanaan dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

**Kata kunci:** Implementasi, Program Indonesia Pintar, Sekolah Menengah Atas (SMA)

### LATAR BELAKANG

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu program bantuan pemerintah yang diberikan kepada mereka seusia sekolah berasal dari keluarga kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. Program Indonesia Pintar diwujudkan pertama kali dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014, dan beroperasi melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP diberikan sebagai identitas untuk para pelajar yang terdaftar sebagai penerima bantuan pendidikan, dan memberikan jaminan terhadap mereka.

Received: Juni 21, 2024; Accepted: Juli 04, 2024; Published: September 30, 2024

\* Nadia Nadia, [2005020006@student.umrah.ac.id](mailto:2005020006@student.umrah.ac.id)

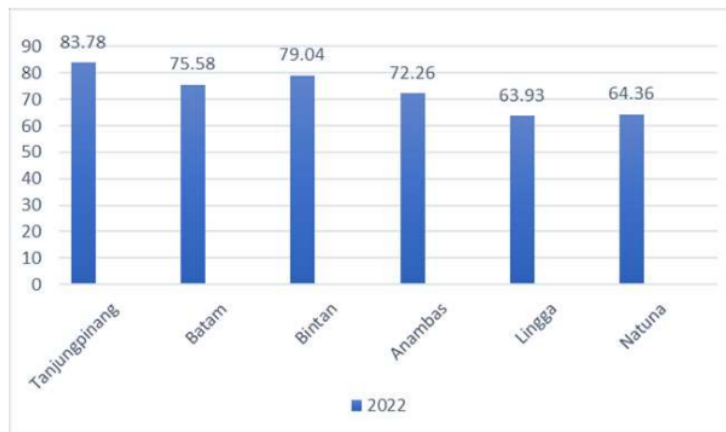
Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi kemiskinan. Pendidikan memberikan dasar yang kuat untuk meningkatkan standar sumber daya manusianya. Dengan demikian, pendidikan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Permasalahan pemerataan pendidikan memang dianggap sebagai tantangan yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu alasan mengapa pemerataan pendidikan di Indonesia masih belum stabil adalah kurangnya aksesibilitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah. Kemiskinan juga menjadi hambatan seseorang untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Hal ini mengakibatkan angka putus sekolah semakin meningkat. Keberhasilan Program Indonesia Pintar juga dapat dilihat dari meningkatnya angka partisipasi sekolah di Indonesia, sesuai dengan tujuannya melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar yaitu pemberian bantuan PIP untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi ke bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah (Dimmera & Purnasari, 2020).

Implementasi melalui program Indonesia Pintar (PIP) perlu dilakukan karena program ini memiliki banyak kepentingan, seperti dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. sehingga melalui program ini pemerintah memberikan bantuan kepada peserta didik agar dapat menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah, serta melalui program ini diharapkan dapat mencapai semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak difabel juga dapat mengakses pendidikan yang setara.

1  
Dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar masih dikatakan belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukannya beberapa kendala. Seperti, persyaratan penerima yang tidak terpenuhi, kesalahan dalam penginputan data oleh operator, atau ketidaksinkronan data antara DTKS dengan dapodik (Ombudsman RI, 2021). Adapun beberapa contoh kasus terkait kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar seperti yang ditemukan oleh Lisa Mandasari (2021) melalui penelitiannya yaitu mengenai Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) menunjukkan bahwa masih ditemukannya dana bantuan Program Indonesia Pintar yang digunakan oleh orang tua/wali murid untuk kebutuhan pribadi (Mandasari, 2021).

Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Endang Suparman (2020) yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tentang Program Indonesia Pintar menemukan bahwa terdapat permasalahan yang terjadi yaitu masih seringkali ditemukan peserta didik penerima dana PIP tetapi juga tercatat sebagai pemanfaat di program bantuan lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya. Hal ini tentu sangat tidak ideal dimana masih banyak peserta didik lainnya yang sama sekali belum mendapatkan bantuan apapun, baik itu dari PIP dan PKH (Suparman, 2020).

Disamping itu dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Provinsi Kepulauan Riau dilansir pada laman Puslapdik, di tahun 2020 Provinsi kepulauan Riau memperoleh persentase yang tinggi dalam penyaluran Program Indonesia Pintar yaitu sebesar 94,27%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan drastis menjadi 53,53%. Di tahun berikutnya, penyaluran Program Indonesia Pintar mengalami peningkatan kembali menjadi 73,08% (Puslapdik, 2023).



Sumber: Puslapdik (2024)

### Gambar 1. Penyaluran PIP Tingkat Kota di Provinsi Kepulauan Riau

Dalam gambar diagram tersebut menunjukkan di data tahun 2022 penyaluran Program Indonesia Pintar di Provinsi Kepulauan Riau terlihat bahwa kota Tanjungpinang memperoleh jumlah penerima Program Indonesia Pintar (PIP) terbanyak yaitu sebesar 83,78% dibandingkan kota yang lain. Meski demikian, hal ini tidak menutup angka pertumbuhan partisipasi sekolah yang ada di kota Tanjungpinang pada tingkat usia Sekolah Menengah Atas (SMA) di Tanjungpinang yang mengalami penurunan di tahun 2022 (BPSkotaTanjungpinang, 2023).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya peneliti akan melakukan penelitian pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kota Tanjungpinang, hal ini dikarenakan pertumbuhan angka partisipasi sekolah yang ada pada tingkat SMAN jauh lebih menurun dibandingkan tingkatan SDN dan SMPN. Hal ini dapat dilihat pada diagram gambar di bawah ini mengenai penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) pada tingkat SMAN di kota Tanjungpinang.

Berdasarkan data Kemendikbud penyaluran Program Indonesia Pintar pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) diatas menunjukkan bahwa penyaluran PIP pada tahun 2019 penyaluran PIP pada tingkat SMAN sebesar 94,55%. Kemudian di tahun 2020 penyaluran PIP pada tingkat SMAN di Kota Tanjungpinang sebesar 91,74%. Namun pada tahun 2021 penyaluran PIP pada tingkat SMAN di Kota Tanjungpinang mengalami penurunan sebesar 40,40%. Sedangkan pada tahun 2022, penyaluran PIP pada tingkat SMAN di Kota Tanjungpinang mengalami sedikit peningkatan berbeda dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 65,15%. Perkembangan terhadap peningkatan penyaluran PIP pada tingkat SMAN di Kota Tanjungpinang dilihat dari data tahun 2022 menunjukkan dampak positif, dikarenakan tahun sebelumnya mengalami penurunan secara drastis (Kemendikbud.go.id, 2023).

**Tabel 1. Penerima PIP tahun 2023 Tingkat SMAN di Tanjungpinang**

No	Nama sekolah	Jumlah siswa
1	SMAN 1 Tanjungpinang	180
2	SMAN 2 Tanjungpinang	230
3	SMAN 3 Tanjungpinang	71
4	SMAN 4 Tanjungpinang	239
5	SMAN 5 Tanjungpinang	90
6	SMAN 6 Tanjungpinang	92
7	SMAN 7 Tanjungpinang	75

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepri (2024)

Dari data yang diberikan, terlihat bahwa SMAN 4 Tanjungpinang memiliki jumlah siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) yang paling banyak dibandingkan dengan sekolah lainnya di kota Tanjungpinang pada tahun 2023. Dengan demikian, memilih SMAN 4 Tanjungpinang sebagai lokasi penelitian memberikan kesempatan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang implementasi dan dampak dari Program Indonesia Pintar di sekolah tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Implementasi Program Indonesia Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Tanjungpinang (Studi di SMA Negeri 4 Tanjungpinang)”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 4 Tanjungpinang. Dalam penelitian, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan model dari Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Sugiyono, 2014). Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memilah data-data penting yang berkaitan dengan implementasi program indonesia pintar. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk uraian teks. Sedangkan tahap akhir penelitian dilakukan dengan membuat kesimpulan terkait data hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Uji validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menggunakan teori dari George Edward III dalam Nugroho (2009:636) menggunakan 4 (empat) indikator yang terdiri dari Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dalam upaya untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Indonesia Pintar di Kota Tanjungpinang yang dilakukan di SMAN 4 Tanjungpinang. Berikut ini merupakan penjabaran secara mendetail terkait pembahasan dari hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti selama turun lapangan yang dilakukan melalui observasi dan wawancara.

### **Komunikasi**

Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukan”. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik.

Pada indikator komunikasi ini, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan telah melakukan komunikasi yang baik diantara mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif dalam mengimplementasikan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 4 Tanjungpinang. Komunikasi yang jelas antara Dinas Pendidikan Provinsi

Kepulauan Riau, sekolah, dan siswa menjadi faktor krusial dalam memastikan pemahaman yang baik tentang program dan partisipasi yang optimal dari semua pihak yang terlibat. Dari hasil wawancara dengan informan, terlihat bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau telah menggunakan media sosial dan telepon seluler untuk menyampaikan informasi terkait PIP kepada sekolah-sekolah, mencerminkan upaya untuk memanfaatkan teknologi dalam penyampaian informasi secara efisien.

Selain itu, penyampaian informasi tentang PIP pada masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menunjukkan waktu yang tepat, karena calon siswa dan orang tua aktif mencari informasi terkait pendidikan pada saat tersebut. Upaya langsung dari sekolah dalam menyampaikan informasi kepada siswa, seperti penerbitan Surat Keterangan kepada siswa dan pembagian Surat Keputusan (SK) kepada siswa yang memenuhi syarat, menegaskan keterlibatan aktif sekolah dalam memastikan pemahaman dan partisipasi siswa dalam program. Kesesuaian praktik komunikasi ini dengan peraturan yang ditetapkan dalam Persesjen Kemendikbud Ristek no.14 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menunjukkan bahwa implementasi program telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menekankan bahwa komunikasi yang baik antara berbagai pihak terlibat merupakan kunci dalam keberhasilan implementasi program pendidikan seperti PIP, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dari semua stakeholder yang terlibat.

Meskipun komunikasi antara Dinas Pendidikan Provinsi, sekolah, dan siswa telah berlangsung dengan baik, namun penyampaian sosialisasi yang hanya dilakukan sekali, yaitu saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB), dapat mengakibatkan siswa lupa atau kurang memahami informasi mengenai Program Indonesia Pintar (PIP). Kurangnya penyampaian sosialisasi yang dilakukan sekali saat PPDB menjadi faktor penghambat dalam komunikasi. Siswa dan orang tua hanya menerima informasi tentang PIP sekali, sehingga ada kemungkinan bahwa mereka lupa atau tidak memahami informasi secara menyeluruh. Dalam Pelaksanaan PPDB biasanya merupakan periode yang sibuk dan singkat, di mana sekolah harus mengurus banyak hal sekaligus. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya waktu untuk menyampaikan informasi secara mendalam mengenai PIP kepada siswa dan orang tua.

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan frekuensi dan kedalaman sosialisasi mengenai PIP, bukan hanya saat PPDB tetapi juga secara berkala selama tahun ajaran. Ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi seperti rapat orang tua guru, media sosial sekolah, papan pengumuman, dan lain sebagainya. Dengan demikian, informasi tentang PIP

dapat tersampaikan secara lebih efektif dan siswa serta orang tua dapat memahami manfaat dan persyaratan program dengan lebih baik.

### **Sumber daya**

Dalam implementasi George Edward III terdapat indikator informasi, dimana informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan, implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut patuh terhadap hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peran serta Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam implementasi Program Indonesia Pintar. Dengan pemahaman yang jelas tentang sumber daya dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi memastikan bahwa program tersebut dapat tersalurkan dengan efektif ke tingkat sekolah. Mereka tidak hanya menyadari bahwa program ini berasal dari Kementerian, tetapi juga menyadari tanggung jawab mereka untuk memastikan informasi yang diperlukan tersampaikan dengan tepat kepada sekolah-sekolah yang terlibat.

Kolaborasi yang baik antara Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah tercermin dalam koordinasi yang terjadi, di mana informasi dari Dinas disampaikan dengan baik kepada sekolah, dan sekolah bertanggung jawab untuk mengkomunikasikannya kepada orang tua siswa. Penggunaan aplikasi Sipintar menjadi alat yang efektif dalam memantau dan melacak proses implementasi program, memastikan bahwa manfaatnya disalurkan kepada siswa yang memenuhi syarat secara tepat waktu. Selain itu, kesadaran akan pentingnya kepatuhan waktu dalam menjalankan program menjadi faktor kunci, karena ketidaktepatan waktu dapat mengakibatkan hilangnya data atau manfaat bagi siswa. Dengan demikian, kesiapan dan komitmen Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan tugas mereka terkait Program Indonesia Pintar menunjukkan upaya yang kuat untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program tersebut di kota Tanjungpinang.

Sasaran kebijakan juga menjadi poin penting dalam keberhasilan implementasi, jika penerima program belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka pelaksanaan program belum bisa dikatakan berhasil. Dalam pelaksanaanya salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam implementasi Program Indonesia Pintar di Kota Tanjungpinang termasuk di SMAN 4 Tanjungpinang adalah kekurangan kuota. Meskipun angka kemiskinan mengalami

penurunan, masih terdapat siswa-siswa kurang mampu yang membutuhkan manfaat dari program ini namun tidak dapat terakomodasi oleh kuota yang tersedia. Kurangnya kuota ini mengindikasikan bahwa sistem alokasi belum optimal dan tidak dapat memenuhi kebutuhan di tingkat lokal. Meskipun telah diajukan permohonan untuk penambahan kuota, keputusan terkait penambahan tersebut masih bergantung pada angka kemiskinan secara nasional, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara kuota yang dialokasikan dan jumlah siswa yang membutuhkan.

Kondisi ini menimbulkan implikasi langsung terhadap efektivitas program, karena tujuan Program Indonesia Pintar untuk membantu siswa kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan terhambat oleh kekurangan kuota. Dalam situasi ini, banyak siswa yang membutuhkan mungkin tidak dapat merasakan manfaat dari program ini, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan angka putus sekolah dan angka kemiskinan.

Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan terkait kuota menjadi kunci penting dalam meningkatkan efektivitas dan kesetaraan akses Program Indonesia Pintar di Kota Tanjungpinang. Diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengidentifikasi dengan akurat kebutuhan kuota di tingkat lokal dan memastikan alokasi yang memadai sesuai dengan kondisi yang ada. Evaluasi secara berkala terhadap implementasi program juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dan mencari solusi yang tepat guna untuk meningkatkan efektivitasnya. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat Program Indonesia Pintar bagi siswa-siswa kurang mampu di Kota Tanjungpinang serta meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi tingkat kemiskinan.

### Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi kegagalan. Menurut Edward III dalam Agustino kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan dalam menjalankan suatu program, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota

Tanjungpinang. Salah satu aspek yang diidentifikasi sebagai penting adalah sikap disiplin pegawai. Melalui observasi dan wawancara, terlihat bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau telah menunjukkan sikap yang bertanggung jawab, adil, dan responsif dalam pelaksanaan PIP. Hal ini tercermin dari komunikasi yang baik antara Dinas dengan sekolah-sekolah, serta penggunaan aplikasi Sipintar untuk memantau dan mengelola proses pencairan dana dengan tepat waktu. Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, menggambarkan keterlibatan mereka dalam memastikan siswa-siswa yang memenuhi syarat mendapatkan manfaat dari program ini, serta memberikan peringatan jika ada keterlambatan dalam proses pencairan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dalam implementasi PIP telah memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas program ini di tingkat sekolah.

Selain itu, responsifnya pihak sekolah terhadap program ini. Melalui wawancara, terlihat bahwa sekolah aktif dalam menyampaikan informasi mengenai PIP kepada siswa-siswa. Mereka mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, seperti memberikan surat keterangan kepada siswa yang memenuhi syarat dan memastikan distribusi dokumen-dokumen terkait dengan tepat. Dalam konteks ini, sikap kooperatif dan tanggap dari pihak sekolah membantu memastikan bahwa proses implementasi PIP berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disposisi yang positif dari para pelaksana kebijakan, baik dari Dinas Pendidikan Provinsi maupun pihak sekolah, merupakan faktor krusial dalam keberhasilan implementasi Program Indonesia Pintar di Kota Tanjungpinang. Sikap yang bertanggung jawab, adil, dan responsif dari para pelaksana kebijakan tidak hanya memungkinkan program ini berjalan dengan baik, tetapi juga memberikan dampak positif bagi siswa-siswa yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian, penting untuk terus mendorong dan memperkuat sikap-sikap tersebut dalam melaksanakan kebijakan pendidikan demi mencapai tujuan program secara efektif.

### **Struktur Birokrasi**

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme, dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan instansi pemerintah. Standar Operasional Prosedur (SOP) dimana nantinya seluruh kinerja yang telah dilakukan stakeholder akan dinilai tingkat keefektifannya dan apakah sesuai dengan prosedur.

Hasil penelitian ini menggambarkan pentingnya struktur birokrasi dalam implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di tingkat sekolah SMA Negeri, khususnya di SMAN 4 Tanjungpinang. Struktur birokrasi yang mencakup mekanisme dan struktur itu sendiri memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan. Aspek mekanisme, terutama diwujudkan melalui Standard Operasional Procedure (SOP), telah diterapkan dengan baik dalam PIP. SOP tersebut, yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal (Pesesjen) Kementerian Pendidikan, memberikan pedoman bagi semua pelaksana kebijakan untuk bertindak sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan.

Selain itu, struktur birokrasi yang terorganisir dengan baik juga terlihat dari pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara lembaga pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta institusi pendidikan dan siswa sebagai penerima manfaat kebijakan. Dengan adanya struktur yang terdefinisi dengan baik, setiap tingkatan dalam struktur birokrasi memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik dalam pelaksanaan PIP. Misalnya, di tingkat pusat, Kemdikbud Ristek melalui Puslapdik bertanggung jawab atas koordinasi dan penyaluran dana, sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tim PIP Dikdasmen memiliki tugas dalam mengelola dan memantau pelaksanaan PIP di wilayahnya.

Selain itu, implementasi PIP juga didukung oleh keberadaan SOP yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal (Pesesjen) Kementerian Pendidikan Nomor 14 Tahun 2022. SOP ini memberikan pedoman yang jelas bagi pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya, sehingga memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dan menjalankan peran mereka dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, struktur birokrasi yang terorganisir dengan baik dan mekanisme yang teratur dalam implementasi PIP telah memberikan landasan yang kuat bagi kelancaran pelaksanaan program ini di tingkat sekolah. Dengan adanya SOP dan pembagian tugas yang jelas, setiap pihak dapat bekerja secara efisien dan efektif sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan dari Program Indonesia Pintar.

## 7 **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dijabarkan maka diperoleh suatu kesimpulan berdasarkan 4 indikator yang telah ditetapkan pada Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) menurut George Edward III, dimana pelaksanaan Program Indonesia

Pintar (PIP) tingkat SMAN Kota Tanjungpinang studi di SMAN 4 Tanjungpinang sudah terimplementasikan dengan baik, meskipun ada beberapa kendala yang harus diperbaiki. Adapun beberapa kendala yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan PIP yaitu, pada indikator komunikasi ini, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan telah melakukan komunikasi yang baik diantara mereka. Namun, penyampaian informasi tentang PIP pada masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) saja. Kurangnya penambahan kuota yang diberikan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kebutuhan dikarenakan masih banyak siswa yang membutuhkan program ini di SMAN 4 Tanjungpinang dan tingkat sekolah di Tanjungpinang. selain itu pada indikator disposisi yang menunjukkan tidak ada pengawasan dalam penggunaan dana yang diperoleh penerima, hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan dana yang dilakukan. Sedangkan pada indikator struktur birokrasi sudah tersalurkan dengan baik.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan agar Program Indonesia Pintar (PIP) ini dapat lebih maksimal bagi sekolah-sekolah yang ada di kota Tanjungpinang terkhususnya pada SMAN 4 Tanjungpinang dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Berikut adalah saran yang dapat peneliti sampaikan dengan menggunakan 4 indikator: (1)Komunikasi

Meskipun komunikasi antara Dinas Pendidikan Provinsi, sekolah, dan siswa telah berlangsung dengan baik, namun penyampaian sosialisasi yang hanya dilakukan sekali, yaitu saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Oleh karena itu, saran pada indikator ini penting untuk meningkatkan frekuensi dan melakukan sosialisasi lebih mengenai PIP, bukan hanya saat PPDB tetapi juga secara berkala selama tahun ajaran. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi seperti rapat orang tua guru, media sosial sekolah, papan pengumuman, dan lain sebagainya. (2) Sumber daya, Sasaran kebijakan juga menjadi poin penting dalam keberhasilan implementasi, jika penerima program belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka pelaksanaan program belum bisa dikatakan berhasil. Dalam pelaksanaanya salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam implementasi Program Indonesia Pintar di Kota Tanjungpinang termasuk di SMAN 4 Tanjungpinang adalah kekurangan kuota. Diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengidentifikasi dengan akurat kebutuhan kuota di tingkat lokal dan memastikan alokasi yang memadai sesuai dengan kondisi yang ada. (3) Disposisi, kurangnya pengawasan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan terhadap siswa penerima program juga menjadi perhatian, karena hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan atau penggunaan dana yang tidak tepat.

Perlu ditingkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana program oleh pihak sekolah dan Dinas Pendidikan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalkan dan program dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif. (4) Struktur Birokrasi, Walaupun struktur birokrasi ini sudah tersedia dan SOP telah diterapkan, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program untuk memastikan efektivitasnya. Langkah-langkah ini harus melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan siswa sebagai penerima manfaat. Dengan demikian, pelaksanaan Program Indonesia Pintar dapat berjalan lebih efisien dan berdampak positif bagi siswa-siswa yang membutuhkan.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Agustino, L. (2014). *Dasar-dasar kebijakan publik*. CV Alfabeta.
- Moleong, L. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2004). *Kebijakan publik, formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Gramedia.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi kebijakan publik*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.
- Alkatiri, R., Lestari, S., Gintulangi, H., & Ahmad, O. (2020). Implementasi program kartu Indonesia pintar di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi*, 3(1). <https://journal.umgo.ac.id/index.php/JPPE>
- Dimmera, B. G., & Purnasari, P. D. P. (2020). Permasalahan dan solusi program Indonesia pintar dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Kabupaten Bengkayang. *Sebatik*, 24(2), 307–314. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1137>
- Fiqih, M., Dayat, U., & Febriantini, K. (2022). Implementasi kebijakan program Indonesia pintar (PIP) pada jenjang sekolah dasar. *Kinerja*, 18(4), 539–546. <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.10097>
- Firdaus. (2019). *Implementasi kebijakan e-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang*.
- Hayati, N., Sari, D. E. Y., Banyuasin, S., & Negeri, S. (2019). *Evaluasi implementasi program Indonesia pintar di SMA Negeri 1 Sembawa*.
- Kristen, U., Wacana, S., Binti, W., Sekolah, Y., Agama, T., Negeri, K., Raya, P., Ismanto, B., Universitas, W., & Wacana, K. S. (2019). *Evaluasi program Indonesia pintar dalam peningkatan akses pendidikan di sekolah menengah pertama*. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1, 44–53.

Mandasari, L. (2021). Efektivitas program Indonesia pintar (PIP) di sekolah dasar negeri Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi*, 49–56.

Mutiara Rakista, P. (2020). Implementasi kebijakan program Indonesia pintar (PIP) (Studi kasus pada sekolah dasar di Kabupaten Banyumas). *Sawala*, 8, 224–232.

Nurokhmah. (2021). Program Indonesia pintar (PIP): Implementasi kebijakan kesejahteraan dalam upaya meningkatkan angka partisipasi pendidikan. *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 2(1), 37–48.

Pesi, P., & Lanin, D. (2022). Implementasi kebijakan program kartu Indonesia pintar di Sekolah Dasar Negeri 11 Bancah Kecamatan Kota Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan. *Publicness: Journal of Public Administration Studies*, 1(2), 82–86. <https://doi.org/10.24036/publicness.v1i2.10>

Silubun, E., & Aedah, N. (2020). Implementasi program kartu Indonesia pintar di SDN Inpres Tanjung Ria Kota Jayapura. *Jurnal Public Administration Studies*, 3(1).

Suparman, E. (2020). Implementasi kebijakan tentang program Indonesia pintar pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Salopa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(2), 18–26. <https://doi.org/10.46799/jst.v1i2.14>

BPS Kota Tanjungpinang. (2023). Angka partisipasi sekolah (persen), 2021-2022. BPS Kota Tanjungpinang. <https://tanjungpinangkota.bps.go.id/indicator/28/173/1/angka-partisipasi-sekolah.html>

Julita Sembiring, L. (2021). Duh! Program Indonesia pintar Rp2,8 T tak tepat sasaran. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210622165926-4-255132/duh-program-indonesia-pintar-rp28-t-tak-tepat-sasaran>

Puslapdik. (2023). Data penyaluran PIP di Indonesia. Puslapdik Kemdikbud. <https://pip.kemdikbud.go.id/penyaluran>

Wajayanti, I. (2021). Ombudsman gelar diskusi tematik bahas penyaluran PIP. Ombudsman RI. <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--ombudsman-gelar-diskusi-tematik-bahas-penyalaran-pip>

Peraturan Menteri Pendidikan No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar yaitu pemberian bantuan PIP.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019).

Peraturan Sekjen Kemendikbud No. 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Peraturan Sekjen Kemendikbud Ristek Nomor 14 Tahun 2022 Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Surat Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan No. 161 Tahun 2023 tentang nominasi dana bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP) sekolah menengah atas (SMA) tahap XLIII Tahun Anggaran 2023.

Surat Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan No. 131 Tahun 2023 tentang pemberian dana bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP) sekolah menengah atas (SMA) tahap XXVII Tahun Anggaran 2023.

# Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 (studi di SMAN 4 Tanjungpinang)

## ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1 repository.umj.ac.id 4%  
Internet Source

2 jurnal.unpad.ac.id 2%  
Internet Source

3 eprints.untirta.ac.id 2%  
Internet Source

4 ojs.uma.ac.id 2%  
Internet Source

5 core.ac.uk 1%  
Internet Source

6 journal.stisipolrajahaji.ac.id 1%  
Internet Source

7 repository.stiewidyagamalumajang.ac.id 1%  
Internet Source

8 jurnal.unigal.ac.id 1%  
Internet Source

jurnal.widyakarya.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	<a href="https://repository.fisip-untirta.ac.id">repository.fisip-untirta.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://ejournal.uksw.edu">ejournal.uksw.edu</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://jurnal.wicida.ac.id">jurnal.wicida.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="https://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://publicness.ppj.unp.ac.id">publicness.ppj.unp.ac.id</a> Internet Source	1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On

# Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 (studi di SMAN 4 Tanjungpinang)

---

## GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

**/0**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---

PAGE 14

---